

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah berperan penting sebagai pengendali masyarakat dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Masalah-masalah yang timbul di tengah interaksi warga ini secara teknis disebut sebagai permasalahan sosial. Permasalahan sosial merupakan agenda penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto¹ dalam tirto.id permasalahan sosial diartikan sebagai adanya ketidak sesuaian antara nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakat yang dimana jika dibiarkan akan menimbulkan suatu permasalahan di sebuah kelompok sosial.

Sejalan dengan pendapat dari Earl Rubington dan Martin S. weinberg² permasalahan sosial didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika terdapat kesenjangan antara nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan mereka. Adanya masalah sosial ini akan membuat interaksi dalam suatu kelompok menjadi terganggu dan menimbulkan permasalahan sosial.

¹ Prinada, Y. 8 Agustus 2018. "Pengertian Masalah Sosial Menurut Soerjono Soekanto & Penyebabnya", [tirto.od.](https://tirto.id) <https://tirto.id/pengertian-masalah-sosial-menurut-soerjono-soekanto-penyebabnya-guLJ>. Diakses pada 10 Januari 2025

² Gramedia.com. "Permasalahan Sosial: Pengertian, Faktor, Penyebab, Dampak, dan Solusi", https://www.gramedia.com/literasi/permasalahan-sosial/?srsId=AfmBOoc5G40OZKwGnsTtkJ_LaKsh5mIx8BWSLswBie2Z8dNKlTufuV0. Diakses pada 10 Januari 2025

Menurut Parillo³ (2002) ada beberapa elemen penting yang menjadi dasar penilaian terhadap suatu masalah sehingga bisa di kategorikan menjadi permasalahan sosial diantaranya adalah:

1. Dapat menimbulkan berbagai kerugian baik terhadap keadaan fisik atau mental baik pada individu atau pun pada masyarakat.
2. Merupakan pelanggaran terhadap satu atau beberapa nilai atau standar yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat atau mereka yang memiliki kekuatan pengaruh di masyarakat.
3. Keadaan yang terus menerus terjadi
4. Memunculkan kebutuhan untuk dipecahkan berdasarkan evaluasi dari berbagai kelompok di masyarakat

Ada berbagai macam permasalahan sosial yang menjadi perhatian pemerintah untuk ditangani seperti Kasus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) / *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), kekerasan pada anak dan perempuan, penyalahgunaan NAPZA, Kasus LGBT, Perceraian, stunting. Permasalahan tersebut pastinya memiliki solusi yang berbeda-beda dalam penanganannya, baik itu melalui regulasi ataupun program.

Pemerintah Indonesia sendiri memiliki berbagai cara dalam menangani permasalahan sosial ini. Permasalahan sosial merupakan fokus utama dalam penyusunan RPJMN secara nasional. Kebijakan ini menekankan pada program-program strategis yang berkaitan langsung dengan isu sosial, di antaranya

³ Devi A, Pasaribu A. 2021. *Masalah Sosial*. Makalah disajikan di dalam website Scribd.id. <https://www.scribd.com/document/504190110/Makalah-Masalah-Sosial>. Diakses pada 10 Februari 2025

penanggulangan kemiskinan, peningkatan mutu SDM, penguatan ekonomi rakyat, serta pembangunan ketahanan keluarga.

Sementara itu pemerintah Kota Bukittinggi telah mengeluarkan beberapa solusi dalam penanganan permasalahan sosial ini yang salah satunya adalah mengeluarkan sebuah inovasi program yang bernama “Sekolah Keluarga”. Sekolah keluarga merupakan bagian dan strategi pembangunan daerah yang tertuang dan sejalan dalam RPJMN 2020-2024, dan RPJMD Kota Bukittinggi 2021-2026 terkhusus nya dalam agenda peningkatan ketahanan keluarga dan kualitas SDM.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas keluarga di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Program Sekolah Keluarga berlandaskan pada mandat UU No. 52 Tahun 2009. Regulasi ini menekankan pentingnya membangun kualitas keluarga demi terciptanya rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik. Di tingkat lokal, komitmen ini diperkuat dengan adanya Perda No. 7 Tahun 2024, yang menjadi payung hukum bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah tersebut.

Secara detail hadirnya sekolah keluarga ini merupakan inovasi dari pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi di kota Bukittinggi itu sendiri, awalnya program ini merupakan ide dari Ketua TP PKK pada saat itu yaitu Ibuk Yeshi Ramlan yang melihat di masyarakat masih banyak terjadi

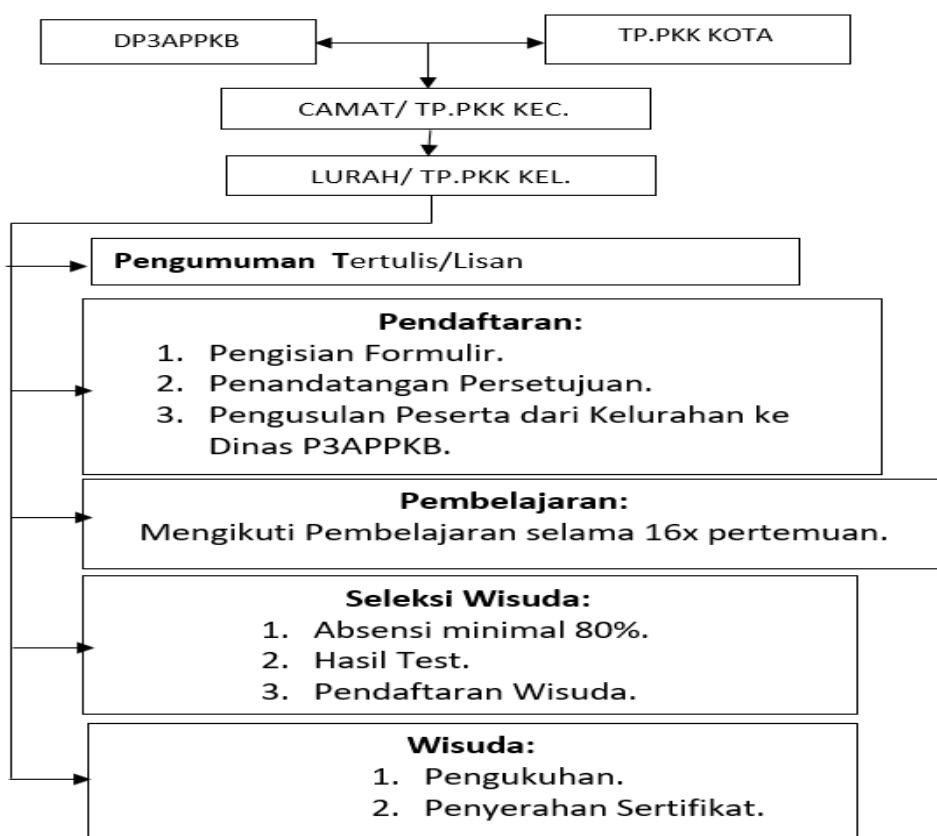
permasalahan yang terjadi dari keluarga seperti kekerasan pada anak, Perceraian, KDRT, dan kenakalan remaja. Dengan adanya fenomena seperti tadi membuat pemerintah pada saat itu perlu menghadirkan solusi dalam menanggulangnya. sehingga pada saat itu pemerintah pun melakukan studi banding ke kota bogor untuk melihat inovasi program kota bogor dalam menanggulangi permasalahan yang serupa dengan melahirkan program yang bernama Sekolah ibu.

Inisiatif program Sekolah Keluarga bermula dari studi banding ke Kota Bogor dan evaluasi terhadap akar permasalahan sosial di daerah. Peneliti menemukan bahwa kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga secara optimal berkontribusi signifikan terhadap munculnya isu-isu sosial. Sebagai solusi, DP3APPKB bersama TP-PKK menghadirkan program Sekolah Keluarga sebagai instrumen untuk mengembalikan peran delapan fungsi keluarga—mulai dari fungsi agama hingga pembinaan lingkungan— demi menciptakan ketahanan keluarga yang lebih tangguh.

Program ini di implementasi kan pada tahun 2018, pada tahun ini program ini hanya berupa pilot project yang dilaksanakan di 1 kelurahan per kecamatan yang dimana dilakukan di 3 kelurahan yang berbeda yang dipilih berdasarkan kelurahan yang banyak terjadinya permasalahan sosial ini. Pada tahun selanjutnya yaitu 2019 program ini dilaksanakan pada 12 kelurahan dengan alasan pada saat itu menyesuaikan dengan anggaran, tetapi pada tahun 2020 dan sampai saat ini program ini telah merata dilakukan di seluruh kelurahan di Kota Bukittinggi yang dianggarkan melalui APBD yang berkisar

Rp. 250.000.000,00 per tahunnya. Sehingga total masyarakat yang telah mengikuti Program Sekolah Keluarga sudah mencapai 1700 lebih lulusan semenjak didirikan.

Gambar 1. 1
Mekanisme Pelaksanaan Sekolah Keluarga



Tabel 1. 1
Susunan Tim Penyelenggara Program Sekolah Keluarga

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Kepala Dinas DP3APPKB	Ketua
2	Sekretaris Dinas DP3APPKB	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Pemverdayaan Perempuan Dinas DP3APPKB	Sekretaris
4	Perencana Ahli Muda Dinas DP3APPKB	Wakil Sekretaris
5	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota

6	Kepala Bidang Pembangunan Keluarga, Pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana	Anggota
7	Camat dan Lurah se Kota Bukittinggi	Anggota
8	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kelurahan se Kota Bukittinggi	Anggota
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas DP3APPKB	Anggota
10	Kasubag Umum Perlengkapan Dinas DP3APPKB	Anggota
11	Staf Dinas DP3APPKB	Anggota

Sumber: Kasi Dinas DP3APPKB

Secara umum pelaksanaan program sekolah keluarga dilakukan oleh tim dari Dinas DP3APPKB yang bekerjasama dengan TP.PKK KOTA dan juga kecamatan dan kelurahan. Dimana pada awalnya akan dilakukan rapat oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk memilih kelurahan yang akan menjadi tempat dilaksanakan program sekolah keluarga yang dimana pada saat ini telah dilaksanakan pada seluruh kelurahan. Hasil pemilihan tersebut akan disampaikan kepada lurah dan camat yang nantinya pihak kelurahan/PKK kelurahan akan merekrut peserta yang akan mengikuti program sekolah keluarga, dengan persyaratan:

1. Lebih diutamakan keluarga rentan dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial
2. Berumur 21 tahun atau sudah menikah
3. Jenis kelamin: Boleh laki-laki atau perempuan.
4. Pendidikan: mampu baca tulis
5. Pakaian rapi dan sopan (warna /disepakati)
6. Mengisi formulir dan melampirkan :

- Foto copy Ijazah terakhir
- Foto copy KK dan KTP
- Surat Pernyataan / Infonit Consen
- Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar

Setelah dilakukannya perekrutan dan pendataran oleh peserta, peserta akan mengikuti program dengan pemberian materi pembelajaran selama 16x pertemuan yang dilakukan 1x dalam satu minggu dalam kurun waktu satu tahun. Adapun materi dan pelatihan yang akan diberikan antara lain

Tabel 1. 2
Materi Program Sekolah Keluarga

FUNGSI AGAMA	Konsep Dasar Perkawinan.
	Penanaman Nilai Agama dalam Keluarga
FUNGSI SOSIAL	Sumbang 12
	Penyalahgunaan Napza
FUNGSI CINTA KASIH	Menjadi Orangtua Hebat.
	Seven Essential Skill
	Sukses Menghadapi Stres Pada Anak
FUNGSI PERLINDUNGAN	Hak Anak
	Anak Berhadapan dengan hukum
	Ayah yang dirindukan keluarga kuat dan hebat
FUNGSI PENDIDIKAN	Komunikasi benar baik dan menyenangkan
	Pelibatan keluarga di satuan pendidikan
	Tantangan mengasuh anak di era digital
FUNGSI PELESTARIAN LINGKUNGAN	Pembudidayaan bunga hias
FUNGSI REPRODUKSI	1000 hari pertama kehidupan
	Pendidikan seksualitas dan pubertas pada anak

FUNGSI EKONOMI	Mengantisipasi perilaku penyimpangan seksual
	Mengantisipasi perilaku seksual beresiko
	Berbisnis Dari Rumah Tangga
	Pemasaran online

Sumber: Petunjuk Teknis Program Sekolah Keluarga Kota Bukittinggi

Pelaksanaan pembelajaran dalam pemberian materi dan pelatihan ini tidak hanya dilakukan oleh dinas DP3APPKB Kota Bukittinggi tetapi bekerjasama dengan pihak terkait seperti :

a. Instansi Vertikal yang terdiri dari :

- Kementerian Agama,
- Pengadilan Agama,
- Kepolisian,
- Kejaksaan Tinggi,
- STIKES,
- Telkom

b. Organisasi masyarakat / profesi

- LKAAM,
- Bundo Kanduang,
- Komunitas Bukittinggi Peduli ASI
- Psikolog

c. SKPD Terkait

- Dinas P3APPKB
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Polisi Pamong Praja
- Kabag Hukum Setda

d. Tim Parenting Yayasan Minang Peduli



e. Pengusaha di Kota Bukittinggi

Setelah dilakukannya proses pembelajaran tadi dalam kurun waktu satu tahun para peserta nantinya akan diwisuda sebagai tanda telah menamatkan pembelajaran pada Sekolah Keluarga. Peserta yang berhak diwisuda adalah peserta yang memenuhi syarat wisuda berupa syarat kehadiran maupun syarat administratif lainnya sesuai yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah Keluarga.

Setelah diimplementasikan nya sekolah keluarga ini kurang lebih 7 tahun, seharusnya terjadi perubahan sesuai dengan tujuan dilahirkannya/dihadirkanya program ini. Untuk melihat dan menilai implementasi dari kebijakan tersebut peneliti menggunakan Teori Ripley dan Franklin, menurut teori ini implementasi sebuah program dapat dinilai dari 3 variabel utama yaitu *Compliance/Kepatuhan*, *Kelancaran*, *Kinerja* dan dampak yang diharapkan.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam teori implementasi Ripley dan Franklin ini adalah aspek kepatuhan. Dilihat dari berjalannya program sekolah keluarga ini terdapat asumsi bahwa aspek kepatuhan ini tidak dilaksanakan secara optimal/tidak tercapai ini dapat dibuktikan dengan data hasil lulusan yang mengalami kesenjangan dengan jumlah peserta awal yang mendaftar tiap tahunnya selama 7 tahun program ini berjalan.

Tabel 1. 3
Data Lulusan Program Sekolah Keluarga

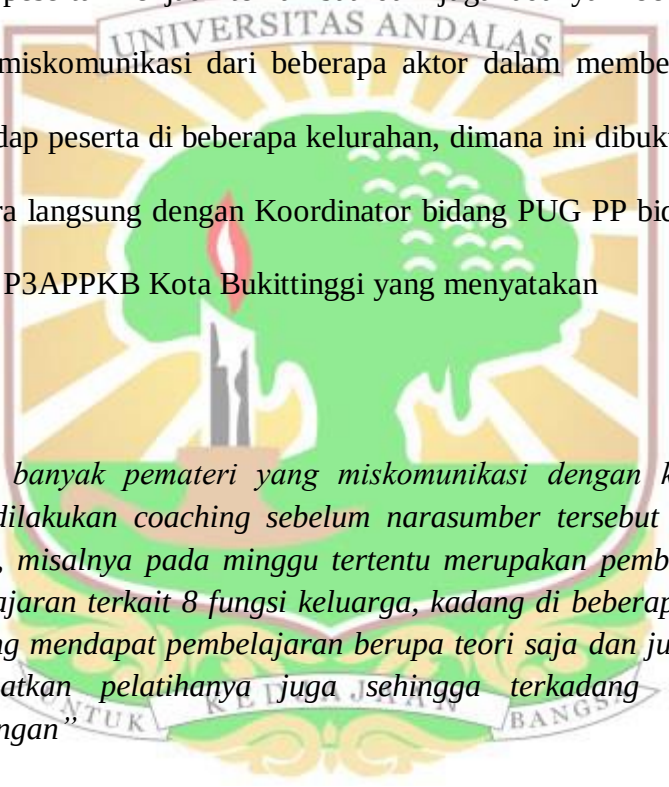
Tahun	Angkatan	Jumlah	Wisuda
2018	I	90	84
2019	II	360	312
2020/2021	III	720	533
2022	IV	624	479
2023	Lanjutan	500	477
2024	V	360	-

Sumber: Kasi PUG PP dinas DP3APPKB Kota Bukittinggi

Dilihat dari data diatas dapat diasumsikan bahwa adanya kesenjangan antara jumlah peserta awal dan lulusan terjadi karena tingkat kepatuhan peserta ataupun para pelaksana masih rendah yang dimana ini menyangkut dengan kedisiplinan peserta maupun pelaksana terhadap SOP, Juknis dan aturan yang berlaku. Setelah dilakukan nya wawancara untuk mencari alasan terjadinya kesenjangan antara jumlah peserta awal dengan lulusan ditemukan bahwa sebagian besar peserta tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan karena tidak hadir penuh atau tidak mengikuti ujian akhir. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada persoalan dalam membangun kedisiplinan dan komitmen peserta terhadap program, baik karena kurangnya pemahaman, motivasi, maupun karena keterbatasan waktu dan kesibukan domestik. Jika kepatuhan ini tidak diperbaiki, maka efektivitas implementasi program akan terus terhambat, dan tujuan untuk memperkuat fungsi keluarga tidak akan tercapai secara optimal.

Dalam teori Ripley dan Franklin aspek kedua yang mempengaruhi implementasi adalah Kelancaran. Pada aspek ini dijelaskan bahwa implementasi

program dipengaruhi oleh kelancaran proses pelaksanaan di lapangan, baik itu dukungan dari beberapa aktor maupun anggaran yang diberikan. Dilihat dari pelaksanaan dari program sekolah keluarga ini dukungan dari para aktor sudah dikatakan tercapai baik berupa instansi maupun lembaga dalam membantu pelaksanaan pembelajaran program sekolah keluarga ini. Tetapi adanya keterbatasan anggaran membuat pengadaan untuk pemberian pelatihan sesuai dengan minat peserta menjadi terhambat dan juga adanya koordinasi yang melemah dan miskomunikasi dari beberapa aktor dalam memberikan materi pelatihan terhadap peserta di beberapa kelurahan, dimana ini dibuktikan dengan hasil wawancara langsung dengan Koordinator bidang PUG PP bidang kualitas keluarga Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi yang menyatakan



“masih banyak pemateri yang miskomunikasi dengan kita padahal sudah dilakukan coaching sebelum narasumber tersebut memberikan materi , misalnya pada minggu tertentu merupakan pemberian materi pembelajaran terkait 8 fungsi keluarga, kadang di beberapa kelurahan ada yang mendapat pembelajaran berupa teori saja dan juga ada yang mendapatkan pelatihannya juga sehingga terkadang ini menjadi kesenjangan”

Dengan keadaan koordinasi yang seperti itu dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program sekolah keluarga ini dan juga terdapatnya faktor di luar kendali yang terjadi di lapangan seperti yang mempengaruhi jalannya program, yang dimana faktor ini berupa kondisi sosial, ekonomi budaya dan lingkungan. Faktor tersebut berupa keterbatasan waktu peserta yang bekerja , perbedaan tingkat pendidikan yang memengaruhi pemahaman terhadap materi,

serta dampak pandemi COVID-19 yang sempat menghentikan kegiatan tatap muka. Faktor-faktor ini menyebabkan peserta kesulitan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian program, meskipun mereka sebenarnya berminat. Dengan adanya fenomena tadi menunjukan bahwa faktor kelancaran yang menjadi aspek keberhasilan implementasi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program sekolah keluarga di Kota Bukittinggi.

Faktor atau aspek terakhir dalam menilai implementasi sebuah program adalah aspek kinerja dan dampak yang diharapkan. Pada aspek ini disebutkan bahwa sebuah program dilihat tidak saja dari tujuan dibentuk nya program tetapi juga dilihat dari dampak nyata yang dihasilkan dari program tersebut baik itu positif maupun negatif. Pelaksanaan program Sekolah Keluarga yang telah berlangsung selama tujuh tahun menunjukkan adanya celah (*gap*) antara tujuan dan hasil. Asumsi ini didukung oleh bukti lapangan berupa hasil wawancara antara Bapak Walikota H. Ramlan Nurmatias, S.H. dengan para lulusan program, yang mengonfirmasi bahwa dampak program belum selaras dengan tujuan yang dicita-citakan.

“beberapa wisudawan merasa kehidupan keluarga mereka semakin harmonis berkat mengikuti program Sekolah Keluarga ini, seperti komunikasi dalam keluarga semakin membaik, dan juga beberapa wisudawan atau peserta menilai bahwa dengan mengikuti program ini perhatian mereka terhadap anak semakin membaik. Secara agama banyak wisudawan yang mengakui bahwa ibadah dalam keluarga mereka yang dulu tidak terlalu teratur sekarang lebih teratur seperti shalat. Dalam bidang ekonomi beberapa wisudawan yang dulunya tidak percaya diri dalam membangun sebuah usaha akhirnya lebih termotivasi dan percaya diri untuk mendirikan sebuah usaha dan bahkan hingga ada usahanya yang mulai berkembang dan juga ada beberapa wisudawan yang belum merasakan dampak apa apa setelah mengikuti sekolah keluarga ini karena kurangnya mengikuti proses dan

hal lain sebagainya”

Adanya kesenjangan yang diperoleh oleh para peserta keluarga saat mengikuti program ini menunjukkan bahwa program ini masih belum mencapai hasil/dampak yang diharapkan dari tujuan dibentuk nya sekolah keluarga ini, dan terdapat juga data lain yang merujuk terhadap hasil/dampak sekolah keluarga yaitu data perkembangan permasalahan sosial di Kota Bukittinggi , sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Data Permasalahan Sosial Di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023

Permasalahan sosial	2019	2020	2021	2022	2023
HIV/AIDS	103	53	43	99	22
Kekerasan pada anak dan perempuan	42	19	55	59	-
Penyalahgunaan NAPZA	70	48	57	70	71
Stunting	27,7%	24,4%	19%	16,8%	12,6%
Perceraian	661	624	679	464	623

Sumber: Data BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021 dan 2022 dan 2023, laporan data stunting dan HIV dinas kesehatan 2023, laporan data polres kota bukittinggi

Jika dilihat dari data diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa angka permasalahan sosial di kota Bukittinggi mengalami kenaikan dan penurunan, kenaikan ditunjukkan dengan kasus HIV dan AIDS yang dimana pada tahun 2022 melonjak naik menjadi 99 kasus, kasus kekerasan pada anak dan perempuan juga melonjak naik menjadi 59 kasus per tahun 2022, bukan itu saja pengguna Narkotika di Bukittinggi juga mengalami kenaikan menjadi 70 orang,

dan terakhir yang mengalami kenaikan adalah kasus perceraian yang naik menjadi 623 kasus pada tahun 2023. Sedangkan untuk kasus yang mengalami penurunan hanya pada kasus stunting yaitu menjadi 12,6% pada tahun 2023.

Jika dilihat dari data diatas maka dapat dikatakan bahwa program sekolah keluarga ini seharusnya memiliki pengaruh terhadap naik dan turun nya permasalahan sosial di kota Bukittinggi jika dikaji dari tujuan di buatnya program ini. Bisa dilihat bahwa Permasalahan sosial ini masih banyak terjadi seperti angka perceraian yang tinggi, kekerasan pada anak, LGBT hingga ekonomi masyarakat yang mulai turun dan juga permasalahan yang sangat berkaitan dengan keluarga yaitu perceraian dan KDRT masih tergolong tinggi. Ini menunjukkan dampak program ini belum menyentuh seluruh lapisan keluarga secara merata. Hal ini mengonfirmasi adanya kesenjangan antara target dan hasil program. Evaluasi dampak menjadi instrumen penting untuk menilai ketepatan strategi serta memastikan bahwa distribusi manfaat program telah menjangkau sasaran prioritas, yakni kelompok keluarga yang paling rentan. Menurut Kepala Dinas DP3APPKB akar dari permasalahan sosial ini memang berasal dari fungsi keluarga yang salah sehingga menimbulkan beberapa permasalahan sosial yang terjadi. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu tentang penyebab dari permasalahan sosial. Sejalan dengan pendapat Taftazani, B.⁴ bahwa dikutip dari jurnal nya sendiri:

keadaan disfungsi sosial mempengaruhi munculnya masalah sosial. Misalnya anak yang terlantar dan terbuang karena fungsi-fungsi sosial

⁴ Taftazani, B. (2017) Masalah Sosial dan wirausaha sosial. Share Social Work Journal, 7(1), 90–101.

dalam keluarga tidak berjalan, maka anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri. Karena kebutuhan emosional dan personalnya tidak terpenuhi ia cenderung memiliki konsep diri yang buruk (hal sama dapat terjadi pada anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan dalam keluarga). Jika tidak ada penanganan dengan segera, maka anak tersebut berpotensi untuk bertingkah laku menyimpang (deviant behavior). Dengan demikian keadaan disfungsi sosial dapat menyebabkan munculnya masalah sosial.(Taftazani B, 2017:90-101)

Fokus dari Sekolah Keluarga ini adalah bagaimana penanggulangan dan pencegahan permasalahan sosial yang banyak terjadi dari keluarga itu sendiri. Adanya Sekolah Keluarga di harapkan dapat membantu dalam pencegahan permasalahan sosial seperti kekerasan, penyimpangan moral anak dan yang lainnya. Sehingga *ouput* dari Sekolah Keluarga ini adalah untuk peningkatan ketahanan fungsi dari keluarga dan menekan angka permasalahan sosial.

Secara peraturan atau regulasi kebijakan ini berdasarkan atas Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin.

Dan Undang Undang lain yang mendasari program ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”.

Dan juga peraturan atau regulasi lain yang memuat keberlangsungan inovasi ini telah dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan seperti Surat Keputusan Walikota maupun berupa Petunjuk Teknis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Keputusan Walikota Bukittingggi Nomor: 188.45-15-2018 tentang Penetapan Kelurahan Penyelenggara Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi Tahun 2018;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah Keluarga Angkatan II Tahun 2019;
3. Keputusan Walikota Bukittingggi Nomor: 188.45-23-2019 tentang Penetapan Kelurahan Penyelenggara Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi Tahun 2019;
4. Keputusan Walikota Bukittingggi Nomor: 188.45-107-2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2022.

inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam menangani permasalahan sosial yang dikeluarkannya program sekolah keluarga, yang sudah berjalan kurang lebih 7 tahun dimana kota Bukittinggi aktif serta konsisten melaksanakan program ini tiap tahun, dengan jumlah peserta yang cukup besar dan cakupan seluruh kelurahan dan menjadi bahan rujukan oleh beberapa kota lain menjadi alasan peneliti dalam memilih kota ini menjadi tempat penelitian dan juga fenomena yang ditemukan peneliti menjadi alasan kenapa program ini harus di evaluasi terkhusus nya di implementasinya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah melakukan Evaluasi Implementasi Program Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah disajikan dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana proses implementasi berlangsung dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
- b. Apa saja hasil yang diperoleh selama proses implementasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi dari program sekolah keluarga yang ada di Kota Bukittinggi dan juga mendeskripsikan serta menganalisis implementasi dari program sekolah keluarga di Kota Bukittinggi

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan akademis dan bahan kajian dalam bidang kebijakan publik. Secara akademis, hasil riset ini juga berfungsi untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman peneliti mengenai implementasi serta evaluasi kebijakan di lapangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, riset ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi implementor Program Sekolah Keluarga dalam memperbaiki tata kelola program. Hasil evaluasi ini bertujuan untuk memberikan pandangan objektif guna

mendorong pelaksanaan program yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

